

**PERILAKU POLITIK PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA MADIUN
(STUDI PERILAKU PEMILIH PADA PILKADA DI KOTA MADIUN)**

Agus Prasetya¹ dan Adi Suparto²

Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Surabaya

¹aguspratya@ut.ac.id dan ²adisuparto@ut.ac.id

Abstrak

Fakta sosial menunjukkan bahwa proses demokrasi lokal, yang harus dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan, yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik dari rakyat untuk memilih pemimpin, belum menghasilkan hasil yang maksimal. Penelitian ini merupakan salah satu kualitatif prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik observasi, wawancara mendalam (depth interview) pada subjek penelitian (pemilih) dengan teknik snowball yang ada di daftar pemilih di KPU. Peneliti menggunakan beberapa studi teoritis, antara lain: teori pertukaran sosial, teori perilaku sosial, teori aksi sosial. Madiun hasil pemilu kota, subyek penelitian terdiri dari pemilih, orang-orang memberikan jawaban, bahwa kemenangan dalam pemilu pada 29-Agustus-2013 oleh Garis karena modal sosial dan modal ekonomi. Calon Walikota dan Wakil Walikota Madison yang memiliki pengalaman politik, modal ekonomi, dan modal sosial yang baik memenangkan pemilu 2013. Hasil pemilu sesuai pleno rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada 9 September 2013, sebagai berikut: Telepon: 49.50%, pari: 33.50%. top-Care: 2,50%. Clouds- 19: 7,6 % Pure: 6: 30% dan ARH: 1,95% dari jumlah pemilih dalam pemilih tetap daftar 146,634 pemilih.

Kata Kunci: Pemilihan, Perilaku Pemilih, Komisi Pemilihan Umum, preferensi pemilih.

Abstract

Social facts indicate that the local democratic process, which should be able to run properly and correctly according to the purpose, namely to increase political participation from the people to elect a leader, has yet to produce maximum results. This study is a qualitative one of the research procedures that produce diskripif data that has form of speech, writing, and the behavior of those who observed. Techniques of collection data in this study with the techniques of observation, in- depth interviews (depth interview) on the subject of research (voters) with snowball technique that is on the list of voters in the Election Commission. Researchers used several theoretical studies, among others: social exchange theory, the theory of social behavior, the theory of social action. Madiun election results, the study subjects consisted of voters, the people give answers, that the victory in the elections on 29-Aug-2013 by Line because of social capital and economic capital. Candidates for Mayor and Vice Mayor Madison city that had political experience, economic capital, and social capital that both won the election of 2013. The results of the election in accordance plenary recapitulation Election Commission on 9 September 2013, as follows: Line: 49.50%, Pari: 33.50%. top-Care: 2.50%. Clouds- 19: 7.6%% Pure: 6:30% and ARH: 1.95% of the number of voters in the final voters list 146.634 voters.

Keywords : Elections, Voter Behavior, Election Commission, voter preferences.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) sebagai kegiatan politik lokal di daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 dan kemudian direvisi dengan Undang-undang No 32/2004 tentang pemerintahan daerah yang didalam nya mengatur tentang pemilihan kepala daerah.. Kemudian dijabarkan dalam PPNo. 6 /2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian seorang kepala daerah. Termasuk didalam nya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.3/2005 tentang perubahan atas UU No.32/2004 dan PP No.17/2005 tentang perubahan atas PP.No.6/2005. Fakta sosial menunjukkan bahwa proses demokrasi lokal seharusnya baik dan benar sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan partisipasi politik rakyat untuk memilih pemimpinnya / walikota ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal dimana para elite politik lokal dan partainya melakukan polarisasi pemilih dalam memilih dan menentukan calon wali kota maupun wakil wali kotanya.

Polarisasi pemilih, sudah barang tentu menunjukkan hakekat demokrasi yang hakiki dan kedewasaan dalam lewat proses pemilihan kepala daerah. Proses yang nampak adalah demobilisasi massa pemilih dan rekayasa sosial politik elite politik partai, sehingga perilaku politik masyarakat tidak berkualitas dan cenderung tidak rasional.

Perilaku politik (politik behaviour) adalah perilaku politik yang dilakukan oleh insan individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai insan-insan politik. Setiap individu diwajibkan oleh negara untuk dapat melakukan hak, kewajiban dan guna melakukan perilaku politiknya. Dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di seluruh Indonesia terindikasi adanya politik uang oleh kandidat pimpinan hal tersebut menunjukkan perilaku politik menyimpang dari pemilih walaupun bukti-bukti sulit dibuktikan, sehingga hasil pemilu tetap sah secara hukum.

Pada tahun 2014, sesuai pleno KPU direncanakan pemilu nasional untuk memilih presiden, DPR/MPR, dan pada tahun 2013 seluruh pilkada tingkat Kabupaten dan kota serta propinsi harus sudah melaksanakan pilkada. Informasi berkembang di masyarakat banyak issue yang berkembang tentang mentalitas perilaku pemilih, ketidakjujuran oleh pemilih. Perbuatan menyimpang, seperti politik uang, pembelian kursi, jual beli jabatan posisi jabatan karena pilkada, ada penggelontoran uang oleh calon kepala daerah, calon anggota DPR/MPR untuk para pemilih, bahkan ada yang fantastik.

Hal tersebut berdampak pada kualitas penyelenggaraan pilkada di kot Madiun secara prosedur sesuai yang digendakan pemerintah menurut undang-undang No 22. tahun 2002.

Mengapa perilaku politik pemilih pada saat pilkada langsung perlu dikaji secara mendalam, di era otonomi : pertama merupakan pilkada langsung ke 2 di era otonomi daerah yang perlu dicermati agar terwujudnya sendi-sendi demokrasi. Dan sebagai barometer politik, sosial ekonomi, demokrasi di era otonomi daerah yang sedang dicermati sehingga pilkada yang demokratis, adil, jujur, bebas, aman, damai, demokratis, langsung, umum, rahasia sangat penting dan diperlukan. Sebab ada issue pemikiran sebagian orang untuk mengembalikan demokrasi seperti pada jamannya orde baru, mengingat era otonomi daerah ada konflik komunal, menimbulkan raja-raja kecil di daerah dan adanya politik uang, korupsi, kerusuhan dalam pilkada, karena belum siap menang dan kalah dalam pilkada.

Sebagaimana dengan misi, maksud dan tujuan awal dari otonomi daerah. Dengan perilaku politik pemilih dan calon pimpinan daerah yang menyimpang membuat demokrasi yang digadag-gadag rakyat sebagai suara rakyat akhirnya gagal total karena perilaku politik pemilih dan paracalon pimpinan daerah yang menyimpang, curang dan menciderai demokrasi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah a) bagaimanakah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menciptakan semakin kokohnya demokrasi dan dapat menciptakan integrasi sosial pemilih; b) mengapa terjadi perilaku politik pemilih menyimpang dalam pilkada di Kota dan adakah perilaku menyimpang oleh pemilih dalam pemilihan kepala daerah saat ini.

TINJAUAN PUSTKA

Konsep Perilaku Politik Pemilih

Perilaku Politik adalah perilaku yang dilakukan oleh insan atau individu kelompok guna memenuhi hak dan kewajiban nya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan fungsi social politik, hak dan kewajibannya guna menyalurkan aspirasi politik. Yang dimaksud dengan perilaku politik adalah (chaplin, 1993): (1) Melakukan pemilihan untuk memilih calon pemimpin

wakil rakyat. (2) Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik, mengikuti ormas atau LSM. (3) Ikut serta dalam pesta politik. (4) Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas. (5) Berhak mejadi calon pimpinan politik. (6) Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Secara bebas perilaku politik adalah diartikan keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manivestasi konkritnya telah saling memiliki hubungan dengan kultur. Sikap- sikap warga negara, respon dalam menilai terhadap obyek dan peristiwa politik maupun aktifitasnya terhadap sistem politik yang ada saat ini sangat dipengaruhi pula oleh perilaku elite politik yang memerintah maupun kehidupan sosial budaya masyarakat. (Almond dan Powell dalam Kanta prawira, 1985 :26)

Perilaku politik (political behaviour) dinyatakan sebagai tindakan politik pemilih, tindakan manusia dalam situasi politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat, antara kelompok dan individu yang ada dimasyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Dalam hal ini ada dinamika antara pihak pemerintah atau elit politik, ada yang mentaati pemerintah, yang satu mempengaruhi lain yang kecewa karena janji yang tidak dapat dipenuhi, berunding dengan tawar menawar, yang satu memaknai keputusan, berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat berusaha membebaskan, dan yang satu menutup kenyataan yang sebenarnya. Pihak lain berupaya memaparkan kenyataan sesungguhnya, mencemarkan apa yang akan terjadi, semuanya itu merupakan wujud-wujud perilaku politik (carr, 1951:154)

Tindakan dan perilaku politik individu ditentukan oleh pola orientasi umum yang tampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik. Segala sesuatu bentuk ucapan, pernyataan, tingkah laku, bahkan, mitos sekalipun sebenarnya dapat diungkapkan sebagai akibat pola dan budaya politik. Dengan demikian segala sesuatu perilaku seorang aktor politik merupakan para meter dalam melihat bagaimana sikap individu itu bergaul dan berkumpul.

Aktor-aktor politik menurut surbakti (1992:57) dapat dibagi menjadi 2 (dua) (1) bertipe pemimpin yang mempunyai tanggung jawab atau tugas dan kewenangan untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. (2) Warga masyarakat biasa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajukan tuntutan serta dukungan terhadap aktor politik bertipe pertama, termasuk mengajukan aspirasi, kepentingan atau mengajukan alternatif putusan berlainan dengan keputusan yang telah dibuat oleh aktor politik tipe pertama.

Salah satu substansi dasar yang berkaitan dengan perilaku politik adalah pendekatan tingkah laku politik lebih menjadi titik sentral perhatian dari pada lembaga-lembaga politik atau kekuasaan dan keyakinan politik. Hal ini disebabkan oleh tingkah laku politik pemilih yang merupakan pencerminan dari budaya politik masyarakat yang sarat dengan aneka bentuk karakter dan bentuk kelompok dengan bermacam-macam perilakunya.

Perilaku politik tidak ditentukan oleh situasi temporer, akan tetapi mempunyai pola yang berorientasi pada pola umum yang nampak jelas sebagai pencerminan budaya politik yang sering kali disebut sebagai peradaban politik. Jadi perilaku politik tumbuh atas dasar kesadaran yang mendalam tentang sistem politik yang berlaku atau ideologi politik suatu negara (Budiarjo, 1982 :135). Pokok politik yang disampaikan yang disampaikan oleh kaum “ behavioralisme” adalah tentang pendekatan perilaku dari segi tingkah laku dengan konsep pemikiran sebagai berikut : a) tingkah laku politik memperlihatkan kesatuan integritas yang dirumuskan dalam generalisasi; b). Generalisasi-generalisasi pada dasarnya harus dapat dibuktikan/verivication kebenarannya dengan menunjukkan tingkah laku yang relevan; c) untuk mengumpulkan, menafsirkan data diperlukan tehnik penelitian yang cermat; d) untuk mencapai kecermatan dalam penelitian sedapat mungkin tidak main peran ; e) Penelitian politik mempunyai sikap terbuka terhadap konsep-konsep teori dan ilmu sosial lainnya; f) Dalam membuat analisis politik nilai-nilai pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak main peran (Budiharjo. 1982:136)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perilaku politik dalam penelitian ini adalah perilaku politik pemilih yakni aktivitas-aktivitas sosial politik pemilih dalam memberi politik pilihannya ketika diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di Madiun periode 2014-2019. Perilaku politik yang dimaksud peneliti bahwa perilaku politik yaitu aktifitas politik meliputi keseluruhan tingkah laku politik para aktor politikwarga negara / masyarakat yang dalam manivestasi konkritnya telah saling memiliki

hubungan dengan kultur politiknya atau budaya politik masyarakatnya. Tingkah laku warga masyarakatnya, respon dalam menilai obyek dan peristiwa politik maupun model perilaku politik terhadap sistem politik yang ada.

Pendekatan Politik Pemilih.

Pertama memilih kandidat politik tidak langsung dirasakan oleh manfaatnya sebagaimana pilihan terhadap produk konsumtif, manfaatnya dirasakan diperoleh masa depan, kedua pilihan politik merupakan tindakan kolektif, dimana kemenangan dirasakan oleh pemilik suara terbanyak, sehingga pilihan seseorang senantiasa mempertimbangkan pilihan orang lain. Ketiga pilihan politik senantiasa dihadapkan dengan ketidakpastian utamanya politisi untuk memenuhi janji politiknya dan keempat pilihan politik membutuhkan informasi yang intensif demi terciptanya manfaat di masa depannya.

Perubahan paradigma pelaksana penyelenggara pemerintahan, pada dasarnya adalah karena adanya pilkada kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh pemilih. Pilkada sebagai sarana sebagai sarana pelaksana- naan kedaulatan rakyat di wilayah NKRI berdasarkan UUD 45 dan Pancasila untuk memilih pimpinan daerah kepala dan wakil kepala daerah dengan tahapan- tahapan yakni :a). penetapan pemilih b) pendaftaran pemilih. c) penelitian pasangan calon. d) penetapan dan pengumuman calon. e) pelaksanaan kampanye. g) bentuk, variasi kampanye. h) larangan kampanye(i) dana kampanye.j) pemungutan dan perhitungan suara dalam rangka pilkada kota Madiun. k) penetapan calon. l) pengesahan dan pengangkatan, pelantikan calon wali kota/wakil. Pentahapan dalam PP Nomor 6 tahun 2005 sebagai acuan dalam memberikan gambaran terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah khususnya di kota Madiun.

Penelitian ini bertitik tolak pada asumsi bahwa memberikan suara atau tidak, pemilih pada pilkada secara langsung sebagai bentuk visualisasi perilaku politik pemilih dipilkada senantiasa didasarkan padapertimbangan subyektif. Sehingga perilaku sosial oleh pemilih atau tindakan sosial seseorang mengandung makna yang mendalam, dan berdampak kepadaperbedaan pada setiap individu. Karena itu perilaku politik pemilih sangat variatif serta membutuhkan beberapa motivasi sosial politik yang berlainan setiap perilaku social.

Paradigma fakta sosial, melihat bahwa perilaku sosial pemilih seseorang dibentuk adanya faktor eksternal yang sifatnya memaksa dan mengendalikan individu. Sementara paradigma sosial politik menekankan pada tindakan orang atas dasar tindakan pada makna subyektif. Perilaku politik pemilih akan berulang ketika mendapat reward atau ganjaran yang diharapkan, sebaliknya perilaku politik tidak berulang pada orang, bila melahirkan hukuman yang lebih besar dari pada hadiahnya. Perulangan pemberi suara sangat tergantung pada perulangan atau kesamaan stimulus politik yang diperoleh pada masa lalu sebagaimana dimaksud pada teori pertukaran sosial. Perilaku politik pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan faktor internal.

Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya dalam behaviour sering disebut sebagai faktor stimulus. Sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan pada rasionalisasi berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pemahaman yang dimiliki.

Beberapa variabel dalam penelitian ini sebagai stimulus yang dapat mempengaruhi perilaku politik pemilih pada pemilihan kepala daerah. yaitu : agama, modal sosial figur kandidat, identifikasi partai politik pendukung, isue kampanye, tim sukses, etnis, kelompok penekan / presseur group, modal ekonomi seorang kandidat calon. Oleh karena itu perilaku politik pemilih dipandang memiliki tujuan, dalam menentukan pilihan dalam merespon berbagai stimulus pemilih dapat mempengaruhi perilaku politik pemilih melewati beberapa proses mulai dari pengetahuan sampai pada perilaku politik pemilih.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah Perilaku politik pemilih pada pilkada secara langsung KE 2 Kota Madiun periode 2014-2019. Fenomena Sosial yang terjadi sesungguhnya elite-elite politik selalu memanfaatkan potensi konflik, chaos. Padahal memanipulasi, memobilisasi masa konflik untuk mencapai ambisibis para petualang politik adalah menciderai semangat demokrasi di era otonomi daerah dan tidak sesuai dengan maksud serta semangat UUNo 22/1999 tentang otonomi daerah.

Teori Tindakan Sosial .

Teori tindakan sosial digunakan oleh penulis untuk menganalisis teori perilaku politik.pemilih. Perilaku politik pemilih sebagai tindakan sosial merupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih,

tindakan tersebut asetiap jenis perlaku manusia, yang penuh arti di orientasika pada perilaku orang lain. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang mempunyai makna subyektif bagi dan dari aktor pelakunya.(Johnson, 1986)

Tindakan- tindakan sosial untuk untuk mencapai harapan –harapan dalam aktifitas sosial politik, tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai(wert)seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya, tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan aktor yang melakukannya. Dan tindakan yang didasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging (Jonhson, 1986).

Teori Perilaku Sosial (behavioral Theory)

Menurut P.Blau, perilaku sosial merupakan dasar dari sebagian komunikasi sosial, hubungan- hubungan sosial, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar diantara pertukaran seperti terdapat dalam organisasi sosial yang kompleks.Teori pertukaran perilaku sosial Blau tersebut sangat relevan dengan permasalahan.

Fungsionalisme struktural, akan tetapi lebih memperhatikan fenomena perubahan sosial dari pada fungsionalisme klasik, Blau menunjuk empat komponen atau dimensi perubahan perilaku sosial dari lapangan reduksionisme psikologis dan menempatkan dalam lapangan sosiologis yang dapat digunakan sebagai dasar bahasan “pertukaran perilaku dan kekuasaan dalam organisasi –organisasi besar” tetapi teorinya berlandaskan premis bahwa perilaku manusia ditentukan oleh pertukaran.

Pendekatan behavioral terhadap analisis politik dan sosial berkonsentrasi pada satu pertanyaan tunggal, mengapa orang berkelakuan sebagaimana yang mereka yang membedakan behaviorais dengan ilmuwan adalah ilmu sosial adalah bahwa : a) perilaku yang dapat diteliti (observer behavior) apakah itu \pada tingkat individu atau kumpulan sosial, harus menjadi fokus analisis. b) penjelasan tentang apapun tentang perilaku harus mudah diuji secara empiris. Behavioris secara mendalam telah menganalisis alasan yang mendasari bentuk utama partisipasi politik massa di negara demokratis.elite politik ahli behavioral telah menganalisis perilaku kepemimpinan, menempatkan perhatian khusus pada hubungan cara pemimpin memandang dunia dan tindakan tertentu yang dapat mereka ketahui mengambil tindakan tersebut.

Teori Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial berangkat dari assumsi, do ut des, saya memberi supaya engkau memberi. Menurut mereka semua kontak diantara manusia bertolak dari skema memberi dan mendapatkan kembali dalam jumlah yang sama.

Dengan teori ini bahwa ada begitu banyak pertukaran atau tingkah laku yang dapat dipertukarkan dalam kehidupan sosial, adalah tingkah laku manusia didasarkan pertimbangan untung dan rugi, reward and cost pertukaran sosial bersifat timbal balik berupa pemberian hadiah-hadiah dan merupakan basis atas dasar kohesi sosial diantara manusia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tehnik pengambilan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan pengolahan dengan menggunakan teori Miles and Huberman dengan langkah-langkah : tahap pengumpulan data : 1/ data collection. 2) data reduction. 3) data display dan 4) penarikan kesimpulan Conclution.Langkah penelitian diwali dengan survey lapangan, pembuatan proposal. Pembuatan instrument, pengambilan data, analisa data data, seminar, dan laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

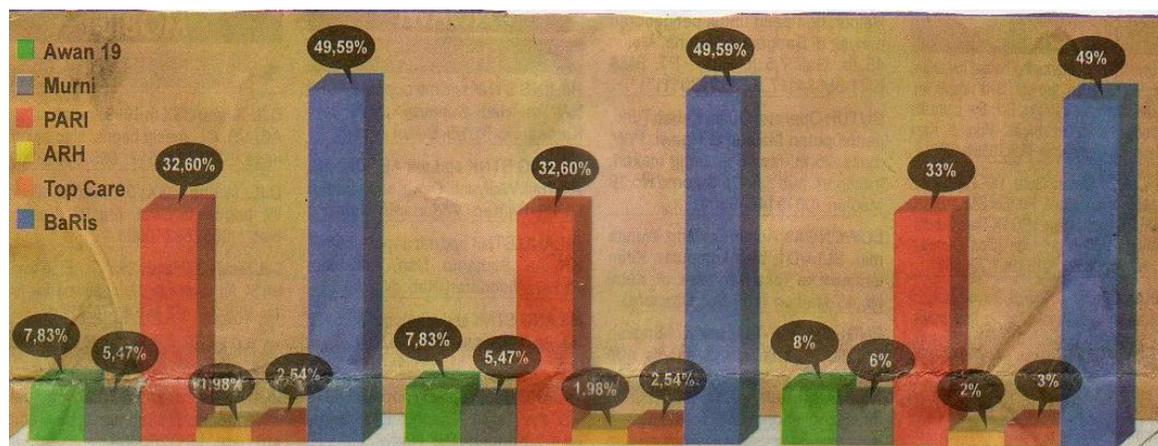
Hasil Pilkada 2013

Pemilihan Umum kepala daerah di kota Madiun telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013, berlangsung dengan langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER). Jumlah pemilih pada pilkada kota

Madiun sejumlah 146.634 pemilih. yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yakni kecamatan Taman, kecamatan Kartoharjo dan wilayah kecamatan Manguhajo. Kegiatan kampanye pilkada dimulai tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 dengan berbagai kegiatan mulai dari safari politik, pawai terbuka, debat kandidat, pemasangan alat peraga kampanye, dan waktu kampanye 2 hari untuk masing-masing kandidat calon walikota/ wawalikota. Hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 9 September 2013 yang dihadiri oleh anggota dari KPU, Panwaslu, saksi pasangan walikota, polri, kodim, sebagai berikut :Baris 49% , PARI 32%, Top-Care 2.5%, ARH 1.95%. Awan 19. 6,9%, Murni 7%, sedangkan pemilih yang tidak (KPU:2013)memilih atau golput yakni hampir 40% pemilih dengan kemenangan pada pasangan Baris yang diusung oleh partai demokrat.

Kemenangan pasangan Baris yang merupakan incumbent mengindikasikan bahwa kekuatan modal sosial dan modal ekonomi kandidat calon memberikan faktor yang menentukan dalam pilkada 2013. Pasangan PARI yang didukung oleh PDI.P dan di usung oleh mantan walikota sebelumnya memperoleh suara cukup besar 33 % dari pemilih,dibanding kandidat dari calon lain yang hanya dapat suara dibawah 10 % dari pemilih. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal sosial dan ekonomi pasangan walikota memegang peran penting kemenangan calon kandidat sebagai walikota.

Calon walikota dan wawalikota Madiun merupakan orang asli Madiun, yang sudah malang melintang didunia sosial politik, sehingga mereka sudah dikenal masyarakat apalagi sekaliber Parji, Bambang irianto, Sutopo, Sugeng Rismiyanto, Kus Hendra dan Heri Kusmedi. Dengan demikian bahwa modal tekad dan niat saja belum cukup untuk memenangkan pilkada tanpa dan dukungan dari modal sosial dan modal di bidang ekonomi belum cukup bagi seorang kandidat calon walikota/wawalikota. Preferensi politik yang melatarbelakangi seseorang pemilih menentukan pilihan karena faktor-faktor spt , identifikasi figur calon, identifikasi partai pengusung, program kerja, materi kampanye, ikatan ideologi pertanian.

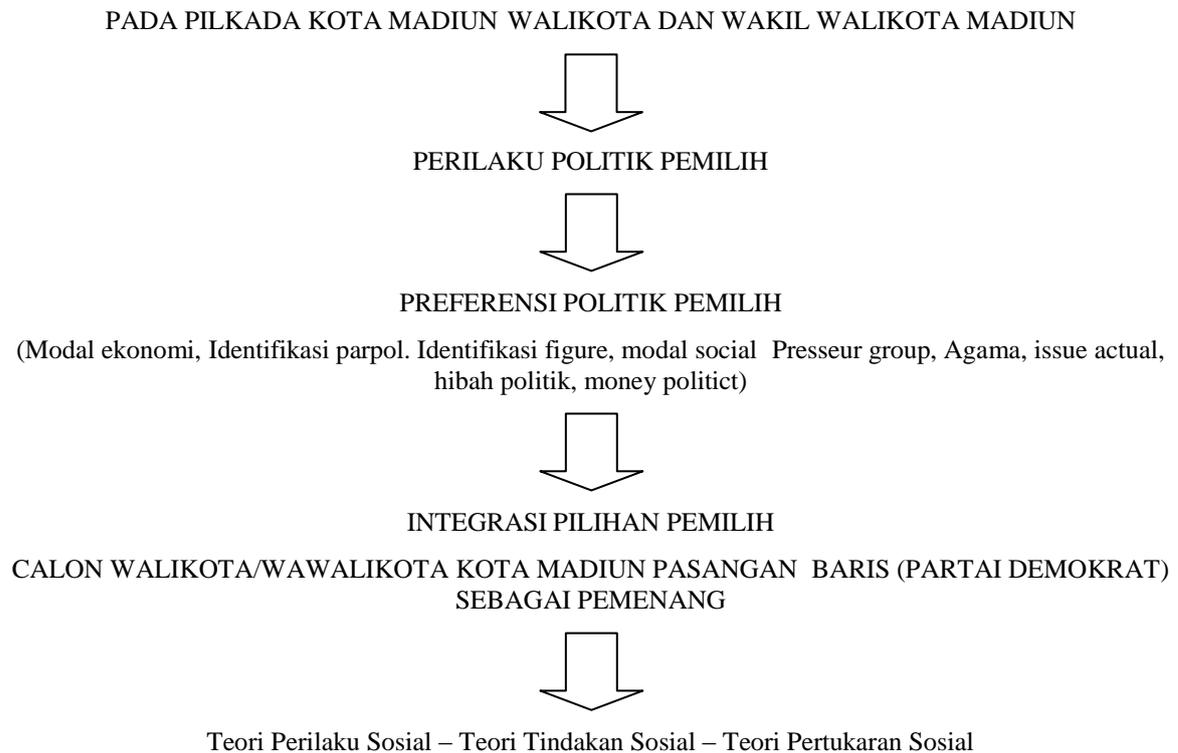


Gambar 1. Diagram Rekapitulasi Suara Pilkada 2013 (Sumber: KPUD Kota Madiun 2013)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih pada pilkada kota Madiun sesuai hasil survey, wawancara, observasi peneliti ada beberapa hal. Pada Gambar 2 adalah skema temuan hasil penelitian dalam pilkada di kota Madiun.

Pembahasan Hasil Pilkada

Teori tindakan sosial digunakan oleh penulis untuk menganalisis teori perilaku politik. pemilih. Perilaku politik pemilih sebagai tindakan sosial merupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut asetiap jenis perilaku manusia, yang penuh arti di orien- tasikan pada perilaku orang lain. Menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang mempunyai makna subyektif bagi dan dari aktor pelakunya.(johnson, 1986) Tindakan actor pemilih dalam rangka menggunakan hak pilihnya dan mendukung partai pilihannya merupakan tindakan social dalam bidang politik untuk menggunakan hak pilihnya. Pendukung partai politik dengan gegap gempita berkampanye mendukung partai idolanya meskipun disertai pengorbanan mental, ekonomi, tenaga, fikiran tidak peduli yang partai pilihannya menang. Kadang kala pendukung partai bahkan sampai empertaruhkan harta, benda, pekerjaan, nyawa sekalipun demi kemenangan calon walikota dan wakil walikota nya.



Gambar 2. Bagan Perilaku Politik Pemilih

Tindakan- tindakan sosial untuk mencapai harapan-harapan dalam aktifitas sosial politik, tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai(wert)seperti etika, estetika, agama dan nilai-nilai lainnya yang dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya, tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan aktor yang melakukannya. Dan tindakan yang didasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging (Jonhson, 1986).

Menurut P.Blau, perilaku sosial merupakan dasar dari sebagian komunikasi sosial, hubungan- hubungan sosial, akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar diantara pertukaran seperti terdapat dalam organisasi sosial yang kompleks.Teori pertukaran perilaku sosial Blau tersebut sangat relevan dengan permasalahan Pilkada.Fungsionalisme struktural, akan tetapi lebih memperhatikan fenomena perubahan sosial dari pada fungsionalisme klasik, Blau menunjuk empat komponen atau dimensi perubahan perilaku sosial dari lapangan reduksionisme psikologis dan menempatkan dalam lapangan sosiologis yang dapat digunakan sebagai dasar bahasan “pertukaran perilaku dan kekuasaan dalam organisasi –organisasi besar” tetapi teorinya berlandaskan premis bahwa perilaku manusia ditentukan oleh pertukaran.

Dalam pilkada di Kota Madiun, perilaku pemilih bermacam-macam seperti kampanye hitam, memberikan bantuan kepada calon pemilih dengan dalih bantuan social, pemberian bantuan social ke fakir miskin, dhuafa’. Calon incumbent lebih vulgar lagi perilaku politiknya dalam dengan memanfaatkan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan daerah yakni bantuan social, bantuan tempat ibadah, pemberian kartu miskin, jamkesmasda, perbaikan rumah degan bedah rumah yang tidak layak huni. Perilaku politik lainnya oleh calon walikota seperti kunjungan ke panti asuhan, tempat kumuh, pondok social dan Liposos, dan panti jompo pembagian beasiswa janji politik bil nanti memperoleh kemengan dalam pilkda. Semua itu tidak terlepas dari niatan untuk kemengan salah satu kandidat calon walikota Madiun.

Teori pertukaran sosial berangkat dari asumsi, do ut des, saya memberi supaya engkau memberi. Menurut mereka semua kontak diantara manusia bertolak dari skema memberi dan mendapatkan kembali dalam jumlah yang sama.Dengan teori ini bahwa ada begitu banyak pertukaran atau tingkah laku yang dapat dipertukarkan dalam kehidupan sosial, adalah tingkah laku manusia didasarkan pertimbangan untung dan

rugi, reward and cost pertukaran social bersifat timbal balik berupa pemberian hadiah-hadiah dan merupakan basis atas dasar koheisi sosial diantara manusia.

Dalam pilkada di Kota Madiun banyak sekali terjadi istilah *give and take* antara pemilih dan calon walikota yang dipilih, Berbagai issue yang berkembang ada calon wali kota yang menggelontorkan modal milyaraan ke calon pemilih baik berupa uang cash maupun bantuan social berupa bantuan modal, bantuan beras dan sembako, bedah rumah dengan harapan memilihnya dalam pilkada, Bagi kalangan aparat pemerintah dijanjikan karier lancar, kemudahan dalam meraih jabatan. Tetapi bila membandel dan memilih lawan politiknya maka sanksi sudah menunggu, dimutasi, pangkat dihambat, yang jelas diberlakukan reward dan punishment dalam memberikan respon atas perilaku pegawai karyan dan masyarakat yang memilih dirinya sebagai walikota Madiun. Hal tersebut selaras dengan teori pertukaran social, *do ut des*.

KESIMPULAN

Pertama, perilaku pemilih dalam pilkada di kota Madiun dipengaruhi oleh faktor- faktor antara lain : identifikasi figur kandidat, identifikasi partai politik, imbalan / ganjaran dari pasangan calon, kelompok penekan, modal sosial, modal ekonomi, issue-issue aktual. Kedua, perilaku politik pemilih adalah tindakan sosial pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di pilkada, yang diwujudkan dalam perilaku politik memilih calon dalam pilkada. Ketiga, pilkada walikota Madiun berlangsung dengan baik, lancar, langsung, umum, bebas dan rahasia. Namun diwarnai banyak tindakan yang kurang sportif yakni adanya indikasi money politics dan saat ini masuk gugatan Pari ke MK. Dan dimenangkan oleh pasangan Baris dari Partai Demokrat / incumbent.

SARAN

Dalam pelaksanaan pilkada, hendaknya modal ekonomi / keuangan kandidat diaudit secara transparan, sehingga modal uang bakal calon walikota dapat diketahui oleh masyarakat dan berimbang. KPUD dan Panswalu hendaknya proaktif mencermati kasus hibah politik di masyarakat sehingga pilkada yang terlaksana benar-benar demokratis. Start pelaksanaan kampanye pilkada agar serentak sesuai jadwal, pelanggaran kampanye hendaknya ditindak tegas terutama penggunaan fasilitas pemerintah sebab masyarakat mensinyalir ada calon walikota yang menggunakan fasilitas milik pemkot Madiun dalam pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Blummer dalam Nimmo 2001. Komunikasi Politik Khalayak dan Efek, Bandung, Penerbit Remaja
- Budiharjo 1982 Dasar-dasar Ilmu Politik, Ganesha Bandung Biro Pusat Statistik tahun 2011 Sensus Penduduk Kota Madiun.
- Casey dalam Nimmo 2001. Komunikasi Politik Khlayak dan Efek. Bandung, Penerbit Remaja Rosda Karya
- Chaplin, 1990. Carr, dalam Nimmo 2001 Komunikasi Politik Khalayak dan Efek Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Huberman and Miles Analisis data kualitatif, UII Press Jakarta
- Johnson, 1986. Teori Sosiologi Klasik Jakarta Penerbit Gramedia Indonsia. Kanta prawiri 1985 : KPUD kota Madiun, 2013 Rekapitulasi Hasil Pilkada 2013
- Laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Madiun tentang Penyelenggan Pemilihan walikota dan wakil walikota 2013
- Nimmo. 2001. Komunikasi Politik Khalayak dan Efek, Bandung, Penerbit Remaja Rosda Karya.
- Miriam Budiarjo, 1981 Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah bunga Rampai, Jakarta, penerbit Gramedia

Peter Blau. 1964. Approaches to study of social structure, New York, The Free Press. Radar Madiun 2013. Hampir Pasti Satu Putaran, Jawa Pos Group

Peter Blau. 1964.. Approaches to Study of Social Structure, New York, The Free Press

Radar Madiun 2013. Hampir Pasti Satu Putaran, Jawa Pos Group,

Surbakti, 1992 : Memahami Ilmu Politik, Jakarta, Penerbit Gramedia widiasarana. Wansong dalam Nimmo : 2001 Komunikasi Politik Khalayak dan Efek, Bandung, Remaja Rosda Karya.

Undang-undang RI. No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Surabaya Penerbit Pustaka Rajawali Pers.

UU.No.22/ 1999. Undang-Undang RI No 22 tahun 1999 Tentang otonomi daerah, Surabaya Pustaka Karina.

UU. No 6 / 2001 Undang-Undang RI, No.6 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Surabaya Pustaka Kaaruni.

:

